

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan peluang dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah guna menambah pendapatan daerah. Semua sumber daya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan agar tidak tertinggal oleh daerah lain. Selain sebagai peluang otonomi juga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, dan mempercepat kesejahteraan rakyat, dengan diberlakukannya otonomi daerah peran serta pemerintah pusat harus dikurangi, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerahnya sendiri guna mempercepat proses pembangunan. Selain itu kebijakan-kebijakan yang diambil harus tepat sasaran, harus sesuai dengan masalah, Kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Keberadaan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam mengurus atau mengelolah daerahnya sendiri dan memiliki peran sebagai wadah bagi warga daerahnya untuk mengungkapkan keinginan mereka dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan aspirasi dan kebutuhan mereka, Selain itu pemerintah daerah harus membuka pola pikir untuk memperhatikan atau memanfaatkan potensi daerah dan faktor pendukung dalam menjalankan suatu daerah seperti meningkatkan Sumber Daya Manusia, meningkatkan dan menjaga Sumber Daya Alam agar pendapatan daerah

semakin meningkat, kemudian mampu memenuhi kebutuhan wajar dan daerahnya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk daerah yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah menuju kondisi yang lebih baik dan di laksanakan di aspek kehidupan. Pembangun daerah meliputi segala aspek faktor keuangan yang menjadi salah satu patokan, karena faktor keuangan yang berbentuk anggaran adalah sebuah rencana kerja pemerintah yang bentuk uang dan rupiah, maka dalam periode tertentu dan pembangunan menjadi tolak ukur tingkat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi yang nyata bertanggungjawab. Selain itu pembangunan daerah harus dikelolah dengan baik agar perekonomian daerah meningkat dan tujuan tercapai secara akurat.

Memenuhi pembiayaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan kegiatan daerah dapat di peroleh dari hasil daerah itu sendiri maupun dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang mampu dilaksanakan yaitu pajak, retribusi dan kekayaan daerah lainnya, peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas dari kerja keras kedua anggota legislatif yaitu bupati dengan DPRD beserta dinas-dinas terkait seperti Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan cara pendekatan yang lebih kepada masyarakat tanpa menghilangkan identitas mereka.

Pengelolaan retribusi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan merupakan suatu tugas pemerintah dalam mengatur proses pemungutan dan mengelolah sumber pendapatan yang di peroleh dari pedagang terhadap pembangunan dan fasilitas yang di gunakan. Kebijakan

retribusi tersebut tidak dikeluarkan begitu saja karena retribusi ini diikat oleh undang-undang dan peraturan daerah setempat.

PERBU dan PERDA dalam pengelolaan retribusi ini adalah agar pemerintah mampu mengarahkan aparat-aparat retribusi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, mampu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi, memberikan pemahaman melalui sosialisasi atau poster yang menyangkut retribusi pasar agar kesadaran membayar retribusi pasar semakin meningkat, serta pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan fasilitas pasar agar masyarakat senantiasa membayar.

Peran Pemerintah Daerah sangat berkaitan erat dengan pengurusan rumah tangga daerah, khusus dalam pendapatan daerah perlu di perhatikan keberadaannya, sarana dan prasarananya pasar, kedisiplinan dan kejujuran aparatur daerah dan partisipasi masyarakat terhadap retribusi, Dengan demikian penerimaan pendapatan daerah semakin meningkat.

Retribusi rumah dinas yang dikelola oleh Sekretariat Daerah di Kabupaten Balangan merupakan pungutan daerah atas pemanfaatan aset milik pemerintah, yang termasuk dalam kategori retribusi pemakaian kekayaan daerah seperti bangunan atau rumah dinas milik pemda. Retribusi ini dikelola oleh Setda sebagai bagian dari pendapatan daerah (PAD) dan bertujuan untuk menertibkan pengelolaan aset, memastikan penggunaan rumah dinas sesuai peruntukan jabatan, serta mencatat pemanfaatan fasilitas negara secara administrasi. Pengguna yang dikenakan retribusi biasanya ASN atau pejabat yang menempati rumah dinas atau pihak yang memanfaatkan bangunan milik daerah, dengan besaran tarif ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan mengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang mana jenis retribusi tersebut adalah:

1. Gedung Bangunan
2. Lapangan
3. Rumah Dinas
4. Tanah
5. Frame Reklame
6. Peralatan Mesin Pertanian
7. Alat-Alat Berat
8. Wisma, dan
9. Kekayaan daerah lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, kenyataan yang terjadi dilapangan dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi bukanlah hal mudah untuk dijalankan oleh pemerintah setempat pasalnya masih banyak permasalahan yang ada, hal ini terlihat dari permasalahan adalah:

1. Pengawasan yang dilakukan tidak efektif, dimana retribusi Rumah Dinas tidak terkelola dengan baik, banyaknya pembayaran yang tidak memenuhi target tiap bulannya, hal ini dikarenakan seringnya pengguna Rumah Dinas yang bepergian keluar kota sehingga dalam tagihan retribusi tertunggak dan tidak mencapai dalam realisasi yang ditargetkan, ada 42 buah Rumah Dinas yang ada pada Perumahan Garuda Maharam, dimana Rumah Dinas Tersebut mempunyai 5 Blok, setiap blok mempunyai besaran sesuai dengan tipe rumah, Blok A, B dan C tarif Rumah Dinas Sebesar Rp. 250.000,- sedangkan Blok D dan E sebesar Rp. 200.000,-, dimana dalam

realisasi yang didapat tiap bulannya hanya mencapai 60% dalam pembayarannya. (Sumber : Retribusi Rumah Dinas Garuda Maharam, 2025)

2. Kesulitan dalam melakukan pembayaran atau kesadaran dalam pembayaran yang menurun, dari tiga bulan terakhir retribusi Rumah Dinas pada Garuda Maharam mengalami penurunan hal ini dikarenakan masih banyaknya oknum atau orang terdekat dengan pejabat sehingga retribusi dirasa kurang penting dalam pembayarannya. (Sumber: Pendapatan Retribusi, 2025).
3. Retribusi yang dilakukan belum mencapai target retribusi yang ditentukan, yang mana retribusi tersebut selalu tidak tercapai dalam perolehannya, yang mana pada tiga bulan terakhir dari bulan Februari, Maret dan April perolehan retribusi pada Rumah Dinas Garuda Maharam mengalami penurunan. Pada bulan Februari perolehan yang didapat sebanyak 60% dan pada bulan Maret menurun dalam perolehannya sebanyak 55% dan April menurun lagi sebanyak 52%.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti **“Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap Pengelolaan

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan) sehingga permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan menurut Menurut G. Terry (2018:315) fungsi pengelolaan:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penggerakan
4. Pengawasan

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan)?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan)?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dalam rangka Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan).